

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1041' – 2044' Lintang Utara, 99°33' – 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif. Area Kabupaten Labuhanbatu di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2018, hari hujan terbanyak terjadi di bulan Nopember sebanyak 21 hari dengan rata-rata curah hujan 269 mm³ (<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

Wilayah Labuhanbatu dilalui oleh tiga sungai besar yaitu sungai Panai, sungai Bilah, dan sungai Kualuh yang memiliki banyak cabang anak sungai. Sungai merupakan sarana transportasi utama dan mudah karena aliran sungai di Labuhanbatu saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Semua kegiatan perdagangan dan hubungan antar wilayah di Labuhanbatu menggunakan

dan bergantung dengan aliran sungai (<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

Sungai Panai berhulu di Padang Lawas dan menjadi pusat bertemunya aliran-aliran sungai lain seperti sungai Bilah dan sungai-sungai kecil lainnya. Sungai Panai menjadi tempat persinggahan barang dan jasa yang akan dibawa keluar dari sungai Berombang menuju selat Malaka untuk dikirim ke wilayah tujuan. Begitu juga sebaliknya barang dan jasa yang datang dari luar akan singgah di sungai Panai, kemudian disebarkan ke wilayah lainnya. Tempat persinggahan kapal-kapal di sungai Panai disebut Labuhan Bilik (<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

Setelah sungai Panai, sungai tersibuk yaitu sungai Bilah. Sungai Bilah berhulu di Silangge dan berhilir di Tanjung Kupia aliran sungai Panai. Sungai Bilah merupakan tempat berkumpulnya barang-barang atau hasil bumi seperti: beras, rotan, getah, damar, dll. Dari daerah-daerah di sekitar sungai Bilah, seperti Negeri Lama, Rantauprapat, Jawi-jawi, dan Marbau. Hasil bumi dari wilayah kesultanan Bilah tersebut dibawa ke pelabuhan Labuhan Bilik melalui sungai Bilah, yang kemudian akan dibawa ke luar wilayah perdagangan seperti Malaka dan Singapura. Begitu juga sebaliknya barang/jasa yang datang dari luar akan melalui sungai Bilah jika ingin didistribusikan ke wilayah kesultanan Bilah (<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

Sungai Kualuh merupakan salah satu sungai terbesar di wilayah Labuhanbatu. Namun aliran sungai Kualuh tidak seproduktif dari sungai Panai dan sungai Bilah. Sungai Kualuh disebut sebagai aliran sungai yang buruk dalam

jalur transportasi di Labuhanbatu. Aliran sungai sering mengalami pendangkalan yang berakibat pada aktivitas transportasi menjadi terganggu. Sungai Kualuh berhulu di Parsoburan Tapanuli Utara dan berhilir di Kuala Bangka(<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

Secara astronomis Labuhanbatu terletak antara 1° 50' sampai dengan 2° 40' Lintang Utara dan 99° 40' sampai dengan 100° 30' Bujur Timur. Jarak antara pusat Onderafdeeling Labuhanbatu dengan Afdeeling Asahan ialah 128 km. Jarak dari Medan ke Onderafdeeling Labuhanbatu ialah 323 km (<http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020).



Gambar 1. Peta Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: <http://bappeda.labuhanbatukab.go.id>

Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif, yaitu:

- Kecamatan Bilah Hulu; terdiri dari 24 desa;
- Kecamatan Pangkatan; terdiri dari 7 desa;
- Kecamatan Bilah Barat; terdiri dari 10 desa;

- Kecamatan Bilah Hilir; terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan;
- Kecamatan Panai Hulu; terdiri dari 7 desa;
- Kecamatan Panai Tengah; terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Panai Hilir; terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan.
- Kecamatan Rantau Selatan; terdiri dari 9 kelurahan.
- Kecamatan Rantau Utara; terdiri dari 10 kelurahan.

Tabel 1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

Kode	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ² /sq.k m)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak Ke Ibukota (km)
050	Bilah Hulu	Aek Nabara	293,23	11,45	-	500-700	19
070	Pangkatan	Pangkatan	355,47	13,88	-	0-7	30
080	Bilah Barat	Janji	202,98	7,92	-	500	6
140	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	276,31	10,79	-	1.6	89
150	Panai Tengah	Labuhan Bilik	483,74	18,89	-	1.6	91
160	Panai Hilir	Sei Berombang	342,03	13,35	-	0-12	101
210	Rantau Selatan	Sioldengan	64,32	2,51	-	43	1
220	Rantau Utara	Rantauprapat	112,47	4,39	-	43	0
	Jumlah / Total	Rantauprapat	2 561,38	100,00	-	0-700	0

Sumber :BPS Kabupaten Labuhanbatu / BPS - Statistics of Labuhanbatu Regency

Tabel 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan/ District	Luas/Area		Penduduk/Population		Kepadatan Penduduk/ Population Density
	KM	%	JUMLAH	%	
Bilah Hulu	293,23	11,45	60.889	13,42	208
Pangkatan	355,47	13,88	33.157	7,31	93
Bilah Barat	202,98	7,92	37.519	8,27	185
Bilah Hilir	430,83	16,82	51.798	11,42	120
Panai Hulu	276,31	10,79	36.746	8,10	133
Panai Tengah	483,74	18,89	37.291	8,22	77
Panai Hilir	342,03	13,35	37.037	8,16	108
Rantau Selatan	64,32	2,51	68.058	15,00	1.058
Rantau Utara	112,47	4,39	91.135	20,09	810
Labuhanbatu	2561,38	100,00	453.630	100,00	177

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu / BPS - Statistics of Labuhanbatu Regency

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rantau Utara	52.585	52.399	104.984
2	Rantau Selatan	35.814	35.623	71.437
3	Bilah Barat	21.198	20.836	42.034
4	Bilah Hilir	29.564	28.331	57.895
5	Bilah Hulu	34.182	33.466	67.648
6	Pangkatan	20.154	19.888	40.042
7	Panai Tengah	19.515	18.296	37.811
8	Panai Hilir	21.121	19.884	41.005

9	Panai Hulu	19.715	18.802	38.517
	Jumlah	253.848	247.525	501.373

Sumber :BPS Kabupaten Labuhanbatu / BPS - Statistics of LabuhanbatuRegency

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu

Kelompok Umur / Age Group	Penduduk / Population (Orang)		
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total
0 – 4	27.890	27.463	55.353
5 – 9	26.143	25.041	51.184
10 – 14	24.137	23.067	47.204
15 – 19	23.360	22.307	45.667
20 – 24	20.678	19.895	40.573
25 – 29	19.584	19.002	38.586
30 – 34	17.855	17.560	35.415
35 – 39	15.717	15.496	31.213
40 – 44	13.622	13.258	26.880
45 – 49	11.688	11.825	23.513
50 – 54	9.832	9.847	19.679
55 – 59	7.635	7.286	14.921
60 – 64	4.785	4.821	9.606
65 – 69	2.632	3.009	5.641
70 – 74	1.750	2.312	4.062
75 +	1.802	2.331	4.133
Labuhanbatu	229.110	224.520	453.630

BPS Kabupaten Labuhanbatu / BPS - Statistics of Labuhanbatu Regency

4.2. Awal Terbentuknya Kerajaan-Kerajaan di Labuhanbatu

Labuhanbatu baru mendapat perhatian ketika Belanda menjadikannya sebagai pusat pemerintahan (Ajrai dan Sofian, 2018:133). Labuhanbatu pada awalnya merupakan sebuah kampung, sama seperti kampung-kampung kecil lainnya yang berada di sepanjang aliran sungai Barumun. Sebelum Belanda melegitimasi kekuasaannya di Labuhanbatu, wilayah Labuhanbatu bersama dengan kampung-kampung lainnya berada di bawah pemerintahan tiga buah kerajaan yakni: Kota Pinang, Bilah, dan Panai (Ajrai dan Sofian, 2018:131). Sebenarnya ada sebuah kerajaan lagi yang mengambil peran penting dalam sejarah Labuhanbatu, kerajaan itu bernama Kesultanan Kualuh. Namun, kesultanan ini memiliki pembahasannya tersendiri, karena bukan berasal dari rumpun yang sama dengan ketiga buah kerajaan tersebut.

Kerajaan Kota Pinang, Bilah, dan Panai diyakini memiliki akar sejarah yang sama, yakni dari daerah Minangkabau. Ketiga buah kerajaan ini selain direkatkan oleh kesatuan latar belakang atau asal usul (serumpun), semakin erat pula hubungannya disebabkan hubungan perdagangan yang terjalin dengan baik. Ketiga kerajaan ini bahkan menjadi pusat kegiatan ekspor dan impor dengan Labuhan Biik sebagai pelabuhannya. Sebelum masa Kolonial Belanda, pelabuhan-pelabuhan tradisional yang bernaung di bawah kontrol Kerajaan Kota Pinang, Bilah, dan Panai memegang peranan yang strategis dalam menopang perekonomian (Ajrai dan Sofian, 2018: 131-132).

Pada sub bahasan kali ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai awal terbentuknya ketiga buah kerajaan yang serumpun di wilayah Labuhanbatu, yaitu

Kerajaan Kota Pinang, Kerajaan Panai, dan Kerajaan Bilah, ditambah Kerajaan/ Kesultanan Kualuh, dalam pembahasan yang berbeda.

4.2.1. Kerajaan Kota Pinang

Kesultanan Kota Pinang pada dasarnya merupakan kunci dari lahirnya kerajaan-kerajaan lain seperti Bilah dan Panai. Namun yang disayangkan, literatur yang membahas induk dari kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu ini sulit ditemui. Nama Bilah dan Panai yang lebih sering dibicarakan.

Kesultanan Kota Pinang bermula dengan didirikannya Istana Kotapinang atau lebih dikenal dengan Istana Bahran ini oleh Sultan Batara Sinomba yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan pada tahun 1630. Sultan ini adalah keturunan dari Sultan dari Minangkabau/ Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin. Kesultanan Kota Pinang pada awalnya bernama Kesultanan Pinang Awan. Menurut sejarah lisannya, nama Kotapinang berasal dari kata Huta Pinangaon, yang artinya pinang yang mengawan atau pinang yang terjulang hingga ke awan. Sedangkan Pinang itu sendiri merupakan tanaman yang memang tumbuh di depan Istana Kesultanan Kotapinang.

Kota Pinang juga dinamai demikian, dikarenakan tanaman pinang tumbuh di sepanjang Sungai Barumon, sehingga membentuk pagar alami. Alhasil, wilayah Kesultanan Kota Pinang juga lazim dikenal dengan sebutan lain, yakni pagar pinang.

Pada masa permulaan berdirinya Kesultanan Kota Pinang, wilayahnya hanya ditempati oleh dua suku besar yaitu Dasopang dan Tamba dengan jarak 30

Kilometer dari Kotapinang. Eksistensi kedua suku itu terlihat dari bukti fisik peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang kemudian menempati wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Selama kedua suku itu meluaskan pengaruhnya di wilayah tersebut, sering kali terjadi silang sengketa yang berujung pada konflik yang melibatkan kedua suku, hal ini dikarenakan masing-masing suku ingin berkuasa penuh atas kawasan tersebut. Aksi saling rebut pengaruh antar kedua suku tersebut tidak kunjung usai, oleh karena itu mereka akhirnya menyerah dengan menyepakati agar kekuasaan diserahkan kepada pendatang yang nantinya ada di daerah tersebut. Akhirnya, kedua suku tersebut malah bersatu untuk mencari pendatang yang akan mengubah hidup mereka supaya menjadi lebih tentram dan jauh dari konflik.

Ketika mereka dalam upaya menemukan sosok pemimpin baru, akhirnya takdir baik menghampiri mereka. Kedua suku itu menemukan Batara Guru Pinayungan yang dipandang layak memimpin mereka. Sesuai sumpah yang dibuat, maka Batara Guru Pinayungan secara otomatis menjadi raja dan diharuskan untuk mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat termasuk warga yang berada selain kedua suku besar tersebut. Batara Guru Pinayungan diyakini berasal dari daerah Pagaruyung. Adapun untuk penjelasan bagaimana Sang Batara Guru bisa sampai ke sana sarat dengan hal-hal yang tidak logis, seperti melayang dan terdampar begitu saja di wilayah yang selanjutnya dikenal sebagai Kesultanan Kota Pinang tersebut (parmatanusantara.co.id).

4.2.2. Kerajaan Bilah

Kerajaan Bilah lahir dari *rahim* Kesultanan Kota Pinang. Nama Bilah berasal dari kata “bilah” yang bermakna sebelah atau sepotong. Kata ini muncul dari pohon nibung yang biasanya dipotong-potong terlebih dahulu untuk dapat dipergunakan sebagai lantai rumah serta keperluan lainnya, begitu juga dengan rotan yang dipotong-potong terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai alat menangkap ikan (bubu/lukah) (Syarif, 2017:154).

Sementara itu permulaan kerajaan ini diawali dengan terbunuhnya Sutan Musa, yang merupakan salah seorang raja/sultan di Kota Pinang pada tahun 1617. Ia digelar Marhum Mangkat di Jambu. Peristiwa terbunuhnya Sutan Musa ini membuat kondisi istana tidak kondusif. Anak-anaknya bahkan dituntut keadaan untuk sebisa mungkin menyelamatkan diri masing-masing dengan cara melarikan diri (Syarif, 2017:148).

Seorang anak raja yang bernama Raja Tahir dalam upaya pelariannya sampai ke sebuah wilayah kecil yang berada di Hulu Sungai Bilah. Daerah kecil tersebut disebut dengan nama Bandar Kumbol. Walaupun ia merupakan seorang pendatang, namun kerajaan-kerajaan kecil (semacam kepala kampung) yang sudah barang tentu telah berada di sana lebih dahulu dengan percaya mengangkat beliau sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut bisa saja tidak mengetahui status Raja Tahir dalam pelariannya. Oleh karena itu, dibutuhkan modal khusus yang dimiliki oleh Raja Tahir untuk mendapatkan pengakuan dari kerajaan-kerajaan kecil di wilayah itu.

Salah satu sejarah lisan menginformasikan bahwa Raja Tahir memiliki kemampuan supranatural atau kesaktian. Kesaktian beliau ini sulit dimiliki oleh sembarang orang. Ia diyakini mampu hidup kembali dalam rupa yang sempurna, meskipun telah terbunuh dengan badan yang tercerai berai (Syarif, 2017:150).

Sutan Tahir resmi menjadi raja bagi wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya pada tahun 1623 seperti: Kerajaan Rantauprapat, Siringo-ringo, Gunung Maria, Sigambal/ Sihare-hare, Bandar Kumbol, Sibargot, Tanjung Medan (Hulu Sungai Bilah), serta Kualah Pinarik, dan banyak lainnya. Ia memimpin daerah tersebut dengan gelar Sutan Tahir Indera Alam. Walaupun Raja Tahir dirajakan oleh raja-raja kecil di sekitarnya, ia tidak dapat langsung menguasai dan memerintah secara langsung terhadap wilayah-wilayah itu. Otoritas penuhnya hanya terbatas pada wilayah kecil bernama Kumbol, sedangkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya memiliki otonomi masing-masing untuk bertindak keluar dan kedalam, dengan catatan tetap membayar upeti kepada Raja Tahir dengan Kesultanan Bilah-nya.

(Syarif, 2017:149)

4.2.3. Kerajaan Panai

Kesultanan Panai berlokasi di Pesisir Sumatera Timur. Sama halnya dengan Kesultanan Bilah, Kesultanan ini memiliki hubungan dengan Kesultanan Kota Pinang . Hal ini juga ada hubungannya dengan Raja Tahir yang merupakan keturunan dari Kesultanan Kota Pinang yang pergi meninggalkan daerah Pinang Awan ke daerah Kumbol (telah disampaikan juga sebelumnya). Raja Tohir

ternyata tidak sendiri ketika melakukan pelarian, ia ditemani saudaranya yang bernama Raja Segar (Nirmawan dkk, 2018:3).

Kesultanan Panai mempunyai ibu kota bernama Labuhanbilik. Di Labuhanbilik lah pemerintahan dijalankan oleh Sultan Panai. Kesultanan Panai juga bertempat di bantaran Sungai Barumun sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya juga. Sungai Barumun tergolong sungai yang luas dan dalam, hal ini cukup menguntungkan sehingga memungkinkan untuk dilayari oleh kapal-kapal besar dari penjuru wilayah.

Pada masa lalu daerah pinggiran sungai-sungai memang dipilih sebagai pusat pemerintahan dikarenakan fungsinya yang fundamental sebagai sarana dan sumber kehidupan sosial dan ekonomi. Kesultanan Panai merupakan salah satu kesultanan yang mendirikan pusat pemerintahan di pinggir sungai. Sungai juga berfungsi sebagai pintu masuk dan jalan transportasi dengan menggunakan perahu (kapal, *tongkang*, *boat*, sampan, rakit, dan lainnya) untuk masyarakat jika ingin menuju ke daerah lain yang berbatasan dengan sungai. (Nirmawan dkk, 2018:3).

Kembali kepada inti persoalan, asal mula Kerajaan Panai, terutama terkait penamannya masih belum diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang dapat menjelaskan asal usulnya sukar ditemukan. Sebagai solusi, Syarif (2017:232) mengetengahkan pernyataan bahwa raja Kota Panai yang pertama bernama Raja Murai yang bergelar Perkasa Alam.

Raja Murai sebenarnya merupakan anak dari Maha Raja Nulong dari Kerajaan Bilah. Ia dikenal memiliki sikap yang keras, pemberani, berjiwa

petualang, serta tidak akan berbalik mundur hingga impiannya kesampaian dengan cara bagaimana pun juga (Syarif, 2017:180).

Pada saat Maha Raja Nulong mangkat, yang menggantikan posisinya bukanlah Raja Murai, melainkan sang adik yang bernama Raja Laut. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Raja Murai untuk pergi ke luar dari Kerajaan Bilah dan mendirikan serta mengembangkan kerajaannya sendiri, bahkan sampai berkonforntasi dengan Kerajaan Kota Pinang.

Meskipun demikian, nama Panai sendiri sebenarnya telah ada 10 abad sebelum Raja Murai mendirikan kerajaannya dengan nama serupa. Hal ini pula yang kembali menjadi perdebatan dari mana nama Panai tersebut berasal. Sementara itu, Kota Panai atau Labuhanbilik sendiri baru secara resmi diabngun oleh Sutan Kaharuddin pada tahun 1815. Beliau merupakan raja panai yang ke-4 (Syarif, 2017:226).

4.2.4. Kerajaan Kualuh

Kesultanan Kualuh tidak memiliki hubungan historis dengan tiga kesultanan lain di Labuhanbatu. Kesultana Kualuh yang berkedudukan di Tanjung Pasir ini berasal dari hasil pertikaian di dalam tubuh Kesultanan Asahan. Kesultanan Kualuh berdiri pada abad ke XIX (Tazli, 2017).

Perselisihan yang terjadi di Kesultanan Asahan ialah antara Raja Hosein dan Raja Ishak. Buntut dari perselisihan ini adalah kesepakatan untuk melakukan ekspansi kekuasaan ke negeri Kualuh. Negeri Kualuh diserang dan dirampas paksa. Negeri Kualuh ini diberikan kepada Raja Ishak sehingga Raja Hosein dapat

bekuasa sepenuhnya di Kesultanan Asahan. Dengan demikian konflik karena haus akan kekuasaan dapat dihindarkan dan masing-masing mendapatkan bagian yang pantas. Raja Ishak kemudian resmi memerintah negeri Kualuh dengan gelar Yang Dipertuan Muda pada tahun 1829. Selanjutnya kerajaan Kualuh diperintah hingga empat orang Sultan (Siagian, 2016:65).

4.3. Struktur Pemerintahan dan Adat Istiadat Kerajaan-Kerajaan di Labuhanbatu

4.3.1. Struktur Pemerintahan

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu negara. Pemerintah memiliki kuasa untuk menetapkan keputusan dan kebijakan demi terwujudnya tujuan negara serta sebagai pemegang kekuasaan secara penuh yang dapat memberikan perintah-perintah dalam sebuah negara. Dalam hal ini, pemerintahan yang dijalankan di Labuhanbatu berbentuk pemerintahan tradisional, yakni kerajaan. Sebagaimana kerajaan pada umumnya, pemerintahan ini disebut juga bersifat monarki. Kerajaan di Labuhanbatu sering pula dikenal dengan istilah kesultana. Kesultanan di Labuhanbatu berjumlah cukup banyak jika dihitung beserta kesultanan-kesultanan kecilnya. Akan tetapi, kesultanan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah besar yang setiap wilayahnya dikuasai oleh seorang raja. Kesultanan di Labuhanbatu itu terdiri atas 4 wilayah kerajaan besar, mulai dari kesultanan Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang.

Kesultanan Kualuh mempunyai luas wilayah 224.980 H.A. Luas kesultanan ini meliputi dataran dan tanah berbukit di bagian barat. Sedangkan batas-batas wilayah Kualuh dapat dijabarkan sebagai berikut: Pada sisi utara berbatasan dengan wilayah kerajaan Asahan, Sementara bagian baratnya berbatasan dengan Tapanuli Utara, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sisi selatannya berbatasan dengan kerajaan tetangga, yakni kerajaan Bilah. Sultan Kualuh menjalankan pemerintahannya dari daerah Tanjung Pasir.

Kesultanan lainnya, yakni kesultanan Bilah mempunyai luas wilayah 279.000 H.A. yang juga meliputi dataran dan tanah berbukit di sebelah barat. Sedangkan batas- batas wilayah Bilah: bagian utara berbatasan dengan wilayah kesultanan Kualuh, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, bagian barat berbatasan dengan wilayah Padang Lawas, dan bagian Selatan berbatasan dengan wilayah kesultanan Panai dan kesultanan Kota Pinang. Negeri Lama merupakan pusat pemerintahan kesultanan ini.

Kesultanan Panai mempunyai luas wilayah 103.000 H.A. yang terdiri dari dataran dan tanah berawa, tidak berbukit sebagaimana kesultanan-kesultanan sebelumnya. Sementara itubatas teritorial Kesultanan Panai dapat dilihat sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan wilayah kesultanan Bilah, sisi timurnya berbatasan dengan Selat Malaka, bagian barat berbatasan dengan wilayah kesultanan Kota Pinang, dan wilayah selatan berbatasan dengan daerah Bengkalis.

Kesultana terakhir dari 4 (empat) kesultanan besar yang berada di Labuhanbatu ialah Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan ini mempunyai wilayah seluas 252.000 H.A. Sementara itu, batas-batas teritorial Kota Pinang dapat dijabarkan sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan wilayah kesultanan Bilah, sisi sebelah timur berbatasan dengan wilayah kesultanan Panai, bagian barat berbatasan dengan wilayah Padang Lawas, dan wilayah yang berada di bagian selatan berbatasan dengan daerah Bengkalis. Kesultanan Kota Pinang memiliki pusat pemerintahan yang serupa dengan nama kesultananannya, yakni di Kota Pinang.

Kesultanan Kualuh, Bilah, Panai, dan Kota Pinang di wilayah Labuhanbatu tidak sepenuhnya berdiri sendiri secara independen. Kesultanan-kesultanan itu beberapa bernaung pada kesultanan atau kekuasaan yang lebih besar. Sebelum dibawah pengaruh Kolonial Belanda, kerajaan-kerajaan itu tercatat bernaung di bawah beberapa kesultanan yang berhasil menaklukkan wilayahnya. Kesultanan Kualuh tunduk kepada Kesultanan Asahan, sebagai konsekuensi atas ditaklukannya kesultanan itu oleh kesultanan Asahan. Tidak hanya Kesultanan Asahan yang pernah membawahi kesultanan-kesultanan di Labuhanbatu, kesultanan bercorak Islam lain di Sumatera yang melakukan hal serupa terhadap kesultanan-kesultanan di Labuhanbatu ialah Kesultanan Siak dan juga Aceh. Bahkan dua buah kesultanan ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup besar, sehingga pernah menguasai berbagai wilayah kesultanan-kesultanan lainnya di Sumatera Timur.

Beberapa istilah penting yang dikenal dalam sistem kerajaan –kerajaan melayu pada umumnya ialah seperti: raja bergelar ;sultan,yang dipertuankan,sutan,datuk (memiliki kekuasaan dan wilayah)dan wajir/ wazir. Istilah-istilah tersebut memiliki posisi sebagai pemerintah dari sebuah kerajaan atau kesultanan Di luar itu, terdapat pula datuk-datuk angkatan yang bertugas untuk senantiasa mendampingi raja dan tugas-tugasnya. Datuk yang merupakan pembesar kerajaan bertanggung jawab atas berjalannya sistem pemerintahan dengan cakupan tugasnya yang amat penting berupa: dapat memastikan kesuksesan pemerintahan yang dijalankan oleh raja sekaligus juga bertindak sebagai penasehat raja.

Selain datuk, kesultanan Melayu juga memiliki pembesar kerajaan lainnya yang bertindak sebagai pengatur segala sesuatu dalam istana kerajaan. Para pembesar kerajaan itu dikenal dengan bintanga kerajaan. Bintanga kerajaan ini terbagi lagi atas bintanga kanan,bintang kiri dan bintanga dalam. Para bintanga ini merupakan orang-oerang pilihan, tidak sembarangan orang dapat menduduki posisi penting ini. Lazimnya, para bintanga berasal dari salah seorang keluarga atau kerabat raja yang kemudian memikul tanggungjawab besar ini secara turun temurun, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Datuk dan Bintanga dibantu juga oleh beberapa perangkat lain yang memiliki posisi dan tanggungjawab masing-masing serta tidak kalah pentingnya. Perangkat-perangkat pemerintahan tersebut terdiri atas :panglima,hulubalang,shahbandar dan lain sebagainya. Mereka-mereka itulah

yang membantu tugas raja sebagai pemegang otoritas tertinggi dan jika raja mangkat, maka posisinya digantikan oleh keturunan beliau.

Istilah lain yang juga dikenal dalam kerajaan-kerajaan Melayu sebagai pembantu tugas raja ialah: Dewan Diraja (berisikan Raja Muda/Putera Mahkota), Bendahara, Temenggung, Sri Maharaja, serta para Datuk atau Wazir yang membawahi negeri-negeri taklukan/ yang termasuk wilayah di bawah kekuasaan raja. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Sebagai tambahan, dalam mengatur urusan keagamaan, terutama agama Islam, sebagai agama resmi kerajaan, peran raja diwakilkan kepada seorang Mufti Besar. Mufti Besar ini juga dibantu oleh orang-orang pilihan yang bertindak sebagai *kadhi* dan tergabung dalam sebuah “Majelis Syari’ah” (Sinar, 2005:51).

Raja memiliki hak penuh atas setiap keputusan, sehingga keputusannya bersifat mutlak dan tidak terbatas, harus dijalankan. Namun, sistem pemerintahan dalam sebuah kerajaan Melayu, terutama dalam hal ini mencakup kerajaan-kerajaan yang terdapat di Labuhanbatu memungkinkan untuk berjalannya pemerintahan yang demokratis dengan harus dicapainya sebuah kata mufakat melalui jalur perundingan. Hal ini ditemukan dalam sebuah pantun yang sudah melekat kuat dalam jati diri orang Melayu, yang berbunyi sebagai berikut (Sinar, 2005:37) :

“Putus gading karena dikerat
Belum jatuh sudahlah retak
Putus runding karena mufakat
Hukum jatuh benar terletak”

Selain itu, meskipun seorang raja memiliki kuasa penuh atas kerajaan yang ia pimpin namun raja juga sewaktu-waktu dapat ditentang oleh rakyat, jika seorang raja sudah dianggap tidak adil sehingga menyurutkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Beberapa cara yang lazim ditempuh oleh rakyat dalam menentang kezaliman dan ketidakadilan raja ialah sebagai berikut (Sinar, 2005: 31):

- a. Melayangkan protes sesuai dengan semboyan yang diusung, yaitu “*Raja Adil disembah, Raja Zalim disanggah*”. Hal ini menunjukkan iklim berdemokrasi telah mendarah daging dalam jati diri orang Melayu, bahkan sebelum bangsa Barat memperkenalkannya sebagai produk peradaban mereka yang maju.
- b. Jika protes sudah dilakukan, namun kezaliman dan ketidakadilan tidak surut juga, maka jalan yang ditempuh oleh rakyat adalah meracuni raja. Hal ini merupakan cara paling kerap tampil dalam catatan sejarah. Sepertinya, meracuni raja tampak sebagai cara paling senyap dalam upaya melenyapkan raja beserta seluruh kezalimannya.
- c. Membunuh raja tampaknya cukup beresiko. Oleh karena itu, opsi lain yang biasanya dipilih oleh rakyat yang menentang kuasa raja zalim ialah dengan menjauh dari negeri asalnya. Kerajaan membutuhkan kawula atau penduduk untuk melegitimasi kekuasannya. Kedaulatan kerajaan bergantung kepada jumlah rakyat yang menetap di wilayahnya. Seiring dengan bertambahnya rakyat yang pindah ke wilayah lain dan berkurangnya rakyat yang berada di wilayah kerajaannya, seorang raja secara otomatis berangsur-angsur akan kehilangan daulatnya. Hal ini bertolak belakang dengan yang berlaku di Jawa.

Ancaman demikian tidak membuat takut raja di Jawa. Adat yang berlaku di Jawa lebih mementingkan kepemilikan tanah/ wilayah daripada rakyat. Raja di Jawa bahkan tidak ambil pusing jika harus mengusir rakyat dari wilayahnya daripada membiarkan wilayahnya sesak oleh rakyat-rakyat yang tidak patuh (Moertono, 1985:132).

Sementara itu, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan-kerajaan yang terdapat di Kesultanan Kualuh, Bilah, Panai, dan Kota Pinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Raja-Raja yang Pernah Memerintah di Kerajaan-Kerajaan yang Berada di Labuhanbatu

Nama Kerajaan	Nama Sultan
Kota Pinang	Sultan Batara Sinomba
	Sultan Mangkuto Alam
	Sultan Syahir Alam
	Sultan Mustafa Perkasa Alam
Bilah	Sutan Tahir Indera Alam
	Maha Raja Nulong
Panai	Sutan Adil
	Sultan Murai
	Raja Umu
Kualuh	Raja Muhammad Sholeh
	Raja Kaharuddin, dst.
	Raja Ishak
	Sultan Al Hajj Abdullah Syah
	-
	-
	H. Tengku Zainal Abidin

Sumber: Buku Selayang Pandang Sejarah Labuhanbatu dan Tribun-Medan

4.3.2. Adat Istiadat

Kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu merupakan bagian dari luasnya wilayah peradaban Melayu. Oleh karena itu, adat istiadat yang berlaku di Labuhanbatu

juga berlandaskan kepada prinsip yang diyakini oleh keumuman orang Melayu. Orang Melayu memang sangat memperhatikan adat yang mereka junjung, sebagaimana bunyi sebuah pepatah adat berikut (Sinar, 2005:32):

- “Adat itu jika tidur menjadi tilam, jika berjalan menjadi payung, jika di laut menjadi perahu, jika di tanah menjadi pusaka.”
- “Orang hidup dikandung adat, orang mati di kandung tanah”
- “Orang beradat tinggi marwahnya, cobalah cari dalam syarak”

Setelah memahami beberapa pepatah terkait dengan adata dalam pandangan orang Melayu di atas, jelaslah bahwa orang Melayu merupakan kelompok etnis yang terikat dengan adat. Hal ini dikarenakan adat mewakili identitas dan karakter orang Melayu. Oleh karena itu, seluruh kebudayaan yang berasal dari luar harus senantiasa diselaraskan dengan adat yang dipercaya di dalam adat istiadat orang Melayu (Isjoni, 2012:30-32).

Sementara itu, penggolongan adat yang diyakini orang Melayu dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yakni: 1) *Adat yang sebenarnya adat*, adalah hukum alam yang tidak boleh tidak, harus terjadi serta tidak dapat ditambah maupun dikurangi, 2) *adat yang diadatkan*, yakni adat yang merupakan hasil dari kata mufakat yang semula telah dimusyawarahkan oleh masyarakat, serta tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kesenangan rakyat, 3) *adat yang teradat*, yakni kebiasaan yang berlaku di dalam sebuah tatan masyarakat, yang pada kemudian hari dapat berubah menjadi adat, melalui proses yang lama maupun secara spontan atau seketika, 4) *adat istiadat*, merupakan upacara-upacara khusus sebagai perwujudan dari pelbagai kebiasaan yang berlaku (Husny, 1986:231-234).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah berupa upacara-upacara yang diselenggarakan oleh orang-orang Melayu dalam siklus hidupnya. Jika dibahas dalam skripsi yang serba sederhana ini, maka akan sangat banyak sekali upacara-upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Adat istiadat tersebut juga masih banyak yang berakar kepada keyakinan *Pra Islam*. Keyakinan *Pra Islam* yang dimaksud di sini ialah seperti Hindu dan Buddha.

Adat istiadat yang berlaku di kerajaan-kerajaan yang berada di Labuhanbatu meliputi siklus hidup orang Melayu, sebagaimana telah disinggung di awal, yakni mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Sementara itu, kelengkapan-kelengkapan yang biasanya digunakan dalam upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat melayu di kerajaan-kerajaan di wilayah Labuhanbatu ialah seperti: dupa atau perdupaan, tepak sirih, tepung tawar, dan balai.

Berikut merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Melayu di kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu, yang meliputi Kelahiran, Khataman Al Quran, Pernikahan/Perkawinan, dan Kematian:

a. Kelahiran

Kelahiran seorang anak dalam masyarakat Melayu Labuhanbatu, terutama di wilayah Bilah dan Panai mendapat perhatian yang istimewa. Pada mulanya, dikenal istilah “Menempah Bidan”. Bidan yang akan membantu persalinan, dipercaya akan jauh lebih baik jika *dibooking* jauh-jauh hari sebelum tiba masa untuk melahirkan.

Setelah bayi lahir, maka upacara selanjutnya yang dilakukan adalah turun tanah. Upacara ini dilakukan ketika tali pusar telah tanggal dari si bayi. Upacara turun tanah ini pula yang penulis maksud sebagai bagian dari warisan kebudayaan *Pra Islam*, yakni Hindu.

Perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam upacara turun tanah meliputi: seperangkat tepung tawar, belerang yang sudah lebih dahulu dihaluskan serta digulung menggunakan kain, hingga tampak seperti sebuah lilin. Gulungan kain berisi belerang ini nantinya akan dibakar ketika bayi mulai turun ke tanah. Pembakaran gulungan kain ini dimaksudkan agar menjauhkan si bayi dari gangguan-gangguan yang berasal dari jin atau syaithan. Setelah selesai, bidan kemudian akan memandikan bayi dan mencukur rambutnya. Terakhir sekali ialah diadakan jamuan dan pembacaan doa sebagai penutup dari upacara tersebut (Syarif, 2017:140).

b. Khataman Al Quran

Bayi yang telah dilahirkan akan beranjak remaja. Upacara ini berlaku terutama bagi anak laki-laki. Hal ini dikarenakan proses mereka beranjak remaja itu ditandai dengan khitan dan dibarengi dengan khataman Al Quran. Anak laki-laki Melayu biasanya telah menyempurnakan bacaan Al Quran-nya hingga 30 Juz pada usia 15 tahun. Ketika itulah dilangsungkan Khataman Alquran yang diiringi dengan dikhitan/ sunat rasul.

Upacara ini diawali dengan penyelesaian bacaan Al Quran oleh si anak dihadapan guru dan undangan yang hadir. Awal dari rangkaian upacara ini

berlangsung pada pagi hari. Sebagai ungkapan terimakasih, orangtua dari anak tersebut akan menghadiahkan sejumlah kain yang dibungkus dengan rapi lengkap dengan balai pulut dan balai kue serta perlengkapan lainnya kepada guru yang membimbing bacaan Al Quran anak tersebut.

Anak tersebut kemudian ditepung tawari sebagai tanda selamat yang dilakukan secara bergantian oleh guru dan seluruh keluarga serta kerabat si anak. Berikutnya, anak tersebut akan diarak menuju tempat Nacar (mandi) hingga kembali ke tempat gurunya. Selama prosesi arak-arakan tersebut, si anak memakai pakaian haji yang serba putih. Setelah itu anak tersebut kan mandi dan kemudian diarak kembali ke rumah tanpa diperbolehkan berjalan kaki.

Akhirnya, upacara tersebut kemudian ditutup dengan melangsungkan sunat rasul/ khitan terhadap si anak. Jika yang membuat acara khitanan atau khataman Al Quran berasal dari keluarga kerajaan, maka biasanya diadakan hiburan bagi rakyat dengan berbagai atraksi seperti debus, pencak silat, rebana, dan lainnya. Hiburan ini dapat berlangsung selama dua hingga tiga hari tiga malam (Syarif, 2017:141).

c. Perkawinan

Siklus hidup seorang anak akan sampai pula ke tahap melanjutkan keturunan. Untuk dapat sampai ke sana diselenggarakanlah perkawinan demi menyatukan dua insan yang saling mencintai. Oleh karena pentingnya tahap ini dalam kehidupan seorang insan, maka diadakan jugalah upacara khusus yang berkaitan dengannya Perkawinan atau pernikahan dalam adat Melayu juga

dilandasi oleh semangat keislaman. Seorang perempuan yang sudah memasuki usia dewasa, yakni 18 tahun, tidak boleh dihalang-halangi untuk menikah dengan pria pilihan hatinya, bahkan diupayakan agar dipercepat.

Mahar perkawinan masyarakat biasa telah ditentukan sebesar tiga puluh ringgit. Ini merupakan jumlah yang baku sehingga tidak dapat dilampaui ataupun kurang dari pada itu. Jika sampai tidak diindahkan, maka hukum adat akan berlaku.

Masyarakat biasa memang memiliki perbedaan, meskipun tidak banyak, dengan raja atau bangswan. Selain pada mahar, perbedaan juga tampak pada prosesi akad nikah. Akad nikah *orang kebanyakan* (masyarakat biasa) hanya boleh dilangsungkan pada siang hari. Hal ini dikarenakan, waktu malam adalah waktu khusus bagi akad nikah yang digelar oleh pihak kerajaan, atau lazim dikenal sebagai “kawin raja”.

Beberapa ritual atau upacara yang mengiringi perkawinan ini meliputi:

- a. Merisik atau disebut pula dengan telangkai
- b. Meminang atau mengikat janji
- c. Mengantar bunga sirih (disebut juga mengantar tanda)
- d. Berinai dan berdandan
- e. Akad nikah
- f. Bersanding
- g. Mandi badimbar (mandi yang ditujukan agar senantiasa selamat/ mandi selamat)
- h. Melanggar adat (melangkahi)

i. Kain pengasuh

j. Kain haluan

Masing-masing ritual memiliki tata caranya tersendiri dan perlengkapan yang juga telah ditentukan. Tepak sirih, tepung tawar, dan balai merupakan komponen – komponen yang biasanya terdapat dalam prosesi yang dilangsungkan oleh orang Melayu, terutama di kerajaan-kerajaan yang berada di Labuhanbatu terutama Bilah dan Panai (Syarif, 2017:96-97).

d. Kematian

Akhir dari siklus *bani adam* adalah kematian. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ketika ada salah seorang meninggal, maka pada saat itulah masyarakat akan datang beramai-ramai ke rumah ahli musibah untuk berziarah (berkunjung) dan takziah (menghibur) keluarga yang ditinggalkan.

Pada saat kematian ini pula semangat kebersamaan tampak pada masyarakat. Ahli musibah tidak perlu bersusah payah menghimpun warga atau memelas meminta bantuan demi penyelenggaraan *fardhu kifayah* (memandikan, mengkafani, men-shalatkan, dan menguburkan). Begitu mendengar ada yang ditimpa kemalangan, maka masyarakat akan dengan segera berkumpul dan turun tangan membantu apa saja yang bisa dibantu.

Setelah dikuburkan, maka pada malam harinya akan diselenggarakan pembacaan Al Quran dan doa-doa selama tiga malam berturut-turut, bahkan terkadang setelah 7, 40, serta 100 hari akan kembali dilangsungkan oleh keluarga si *mayyit*. Masyarakat akan sangat antusias untuk menghadiri acara yang digelar

pada malam-malam tersebut, bahkan akan mendatangkan malu jika tidak bisa berhadir. Jikapun memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi penghalang, sehingga tidak dapat hadir, maka diusahakan betul untuk dapat dikirimkan salam atau sedikit uang sebagai sedekah (Syarif, 2017:141-142).

4.4. Kerajaan-Kerajaan di Labuhanbatu pada Masa Kolonial Belanda

Belanda sebenarnya sudah menapaki kakinya di Labuhanbatu pada awal abad ke-19. tepatnya pada kurun waktu 1805-1825. Diketahui bahwa pada rentang waktu tersebut tengah terjadi Perang Paderi. Kehadiran Belanda di Labuhanbatu belum bermaksud untuk mengeksploitasi wilayah ini. Belanda datang hanya sekedar memenuhi permohonan Sultan Kota Pinang, Sultan Musthafa, untuk dapat memenangkan perlawanan menghadapi Tuanku Tambusai. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada masa tersebut Belanda sudah menghitung-hitung keuntungan yang akan didapat jika sewaktu-waktu kelak dapat menguasai daerah tersebut (Depdagri Provsu, 1991:226).

Belanda mulai melirik potensi Labuhanbatu sebagai daerah taklukan beberapa puluh tahun setelah kerjasama dengan Sultan Kota Pinang berlalu. Pada tahun 1862, Netscher selaku juru runding atau juru “paksa” sudah melakukan *road tour* ke kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur, yang sebagian besar bersedia terikat kontrak politik dengan Belanda. Usaha ekspansi Belanda ini akhirnya sampai juga di Labuhanbatu untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang berada di sana (Syarif, 2017:341).

Kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu, yakni Kota Pinang, Bilah, dan Panai pada dasarnya tidak menghendaki kehadiran Belanda kali ini, yang bertindak sebagai musuh, bukan sekutu. Para Sultan menolak untuk bekerja sama dengan Belanda, karena tahu bahwa Belanda pasti akan menghisap habis kekuatan mereka dan mengurangi kekuasaan mereka terhadap wilayahnya. Sultan Panai bahkan sempat berupaya untuk berkolaborasi dengan Sultan Asahan untuk mengusir Belanda dari tanah mereka. Namun upaya ini berjalan sia-sia dikarenakan Belanda mulai tidak sabar dengan cara diplomasi. Belanda mulai masuk dengan jalan politik adu domba-nya.

Politik adu domba yang dilancarkan Belanda adalah dengan memanfaatkan hubungan antar kerajaan serumpun yang pada saat itu dalam keadaan yang kurang baik. Dalam hal ini, Belanda menggandeng kembali sekutu lamanya yakni Sultan Kota Pinang untuk melawan Sultan Panai akibat dendam lama Sultan Kota Pinang terhadap Sultan Panai. Dendam itu disebabkan oleh ketidaksediaan Sultan Panai untuk menolong Sultan Bungsu, ayahanda dari Sultan Panai (Sultan Musthafa) pada masa itu dan malah membunuh beliau. Sedangkan Sultan Panai juga memiliki alasan tersendiri sehingga mengurungkan niat untuk membantu Sultan Bungsu. Hal itu didasari oleh sakit hati Sultan Panai terhadap Sultan Bungsu pada waktu Sultan Panai sempat diserang Siak (Depdagri Provsu, 1991:228).

Dalam kolaborasi kali ini, Sultan Kota Pinang kembali dapat memenangkan pertempuran. Kemenangan Sultan Kota Pinang ini sekaligus menjadi kesuksesan Belanda untuk beberapa langkah lebih maju dalam menguasai

kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu. Seperti pepatah *sekali berenang dua tiga pulau terlampaui*, begitulah yang dirasakan oleh Belanda. Kesultanan Kota Pinang yang berpikir Belanda akan menolong tanpa pamrih, ternyata hanya dijadikan pintu pembuka deretan kerajaan yang berhasil ditaklukannya.

Kesultanan Kota Pinang mulai melebarkan sayapnya dengan menguasai Panai dan disusul Kesultanan Bilah. Sultan Kota Pinang tanpa sadar telah memasang perangkap untuk dirinya sendiri. Ia mengikuti permainan Kolonial Belanda dengan sangat baik. Ia menjebak dirinya beserta dua kerajaan serumpun lainnya untuk tunduk di bawah kekuasaan Belanda.

Sikap Sultan Kota Pinang memang patut dikecewakan, karena perlawanan para sultan di Labuhanbatu dengan pendirian mereka untuk menolak Belanda sebenarnya sangat besar. Akibat perlawanan yang berarti dari para sultan, Belanda bahkan merasa perlu menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sekedar ancaman kosong. Belanda memutuskan untuk melakukan ekspedisi militernya di kawasan Labuhanbatu. Ekspedisi yang dinahkodai oleh Kapten Laut Van Rens (bertugas memimpin armada laut) dan Mayor Van Heemskerck (bertugas memimpin pasukan darat), bahkan memboyong kekuatan militer dalam jumlah cukup besar dengan rincian sebagai berikut (Syarif, 2017:342):

1. Setengah Batalyon infantri beserta staf, dua detasemen yang terdiri dari Opsir Indonesia, 25 orang artileri, 2 *Veldhouwitser*, 2 montir 12 inch, 2 orang dokter beserta stafnya, 179 serdadu Belanda berkulit putih dan 227 serdadu Belanda berkulit hitam.

2. Kapal-kapal perang dan kapal penumpang, yakni: “Jambi”, “Amsterdam”, “Sindoro”, “Montrado”, “Delfzijn”, “Dassoon”, dan beberapa *Kruisboten*.
3. Kapal-kapal perang di atas bermuatan 1000 orang tentara, lengkap dengan 49 pucuk meriam.

Akhirnya, 4 dekade kemudian, dengan besluit Gubernur Jenderal Belanda bertanggal 25 Agustus 1865, Belanda dengan resmi dapat melakukan kontrol politik dan menempatkan perwakilannya di Labuhanbatu. Kesultanan Kota Pinang yang semula pernah bersekutu dalam melawan Tuanku Tambusai tidak luput menjadi daerah taklukan Belanda di Labuhanbatu (Syarif, 2017:342).

Besluit pertama tersebut kemudian dipertegas kembali dengan besluit No.2 tertanggal 30 Nopember 1867. Penegasan ini terwujud dalam pembagian wilayah kekuasaan Kolonial Belanda di Asahan, sebagai *Afdeeling* dengan daerah bawahannya (*Onder Afdeeling*) yakni sebagai berikut (Depdagri Provsu, 1991:228):

- *Onder afdeeling* Batu Bara dengan ibukotanya Labuhan Ruku
- *Onder afdeeling* Asahan dengan Tanjung Balai sebagai ibukotanya, dan
- *Onder afdeeling* Labuhanbatu dengan Kampung Labuhanbatu sebagai ibukotanya.

Kehadiran Belanda di Labuhanbatu dan keberhasilannya menundukkan kerajaan-kerajaan di wilayah itu berdampak pada perubahan-perubahan yang menjurus ke arah negatif. Adat istiadat dan nilai-nilai kehidupan yang baik dan telah lama dipegang oleh masyarakat Labuhanbatu perlahan memudar bahkan

hilang ditelan masa (Syarif, 2017:343). Hukum adat bahkan segera ditinggalkan secara perlahan namun pasti dengan kehadiran Belanda beserta tata hukum yang mereka bawa dari luar. Padahal hukum dan adat istiadat yang dipegang sejak lama oleh orang-orang Melayu di Labuhanbatu, sebagai bagian dari alam Melayu raya sudah mengandung keluhuran dan kebijaksanaan. Keluruhan dan kebijaksanaan ini terutama sekali disebabkan pula oleh terikatnya adat Melayu kepada syarak/syari'at Islam.

Sistem pemerintahan di Labuhanbatu juga berubah. Raja-raja dilemahkan posisinya dengan adanya *controleur-contreleur* yang menjadi perwakilan Belanda dalam menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Para *controleur* ini dibantu oleh seorang asisten dalam menjaga efektifitas dan efisiensi pekerjaannya. Hal inilah yang menandai berkurangnya kekuasaan dan wewenang raja di Labuhanbatu.

Keempat kerajaan/kesultanan di Labuhanbatu (Kota Pinang, Bilah, Panai, dan Kualuh) tidak sepenuhnya sengsara. Kerajaan-kerajaan tersebut melalui *Korte Verklaring* (perjanjian jangka pendek) dan *Lange Verklaring* (perjanjian jangka panjang), berhak menarik pajak tanah di wilayah kekuasaannya masing-masing. Di samping itu, Kesultanan Kota Pinang dan Kualuh memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Kedua kerajaan itu diberikan hak untuk tidak hanya mengutip pajak tanah, melainkan juga dapat menarik pajak dari perusahaan perkebunan (*onderneming*) yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Hasil dari penarikan pajak itu selain menjadi penghasilan pribadi sultan juga digunakan

untuk kemaslahatan kerajaan-kerajaan tersebut dan masyarakatnya dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana (Depdagri Provsu, 1991:229).

Pembangunan yang dilaksanakan di Labuhanbatu tidak lantas membuat kita menutup mata atas kezaliman yang dilakukan Belanda di wilayah tersebut. Pembatasan hak dan kuasa raja juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerajaan-kerajaan yang tidak memiliki hak lebih, meskipun merasakan pembangunan namun juga sekaligus menyengsarakan rakyatnya. Hal ini dikarenakan tenaga yang dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut berasal dari hasil kerja rodi masyarakat setelah peraturan yang membenarkan hal itu terbit pada tahun 1907 (Syarif, 2017:345).

4.5. Kondisi Kerajaan-Kerajaan di Labuhanbatu pada Revolusi Sosial

Revolusi sosial yang terjadi pada tahun kedua setelah kemerdekaan Indonesia menjadi tantangan baru bagi kerajaan-kerajaan di Labuhanbatu. Tepatnya peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Maret 1946, secara serentak dan massal hampir di seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera Timur. Sasarannya adalah para *elite* kerajaan, terutama yang berlatarbelakang Melayu.

Aksi besar-besaran ini tentu tidak dapat terjadi hanya dengan reaksi spontan tanpa persiapan. Kemarahan yang memuncak memang sulit untuk dibendung, namun dalam rangka menggerakkan sekelompok massa untuk suatu aksi tertentu, pastilah mengharuskan adanya kesepakatan dan koordinasi khusus, singkatnya, pasti ada dalang dibalik layar. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggungjawab atas peristiwa ini adalah mereka yang bersatu dalam kelompok

radikal, meliputi Pesindo, PNI, dan PKI. Menurut Anthony Reid (2012:316-317) sedikitnya ada tiga motif dibalik penggerakan massa dalam operasi ini, ketiga motif tersebut ialah:

1. Para pembesar kerajaan, terutama raja/sultan memiliki hubungan yang dekat dengan Belanda. Hal ini dikhawatirkan akan membuat lemah pondasi kemerdekaan yang baru saja dibangun.
2. Para *elite* kerajaan memiliki harta kekayaan yang melimpah. Revolusi sosial juga dimaksudkan untuk dapat menguasai kekayaan yang banyak tersebut, misalnya saja untuk mendanai berbagai aksi mereka lainnya.
3. Untuk tujuan yang lebih “mulia”, gerombolan yang menyerbu kerajaan-kerajaan itu berusaha menciptakan iklim pemerintahan dan birokrasi yang lebih demokratis. Padahal nyatanya kelompok itu tidak memiliki dasar pemikiran dan rencana yang realistis untuk sebuah tatanan Negara demokratis baru yang mereka idam-idamkan (Reid, 2012:316).

Setelah menelisik berbagai tujuan yang mendasari “perjuangan” mereka, maka kemungkinan terbesar hanyalah upaya besar-besaran dalam menjarah harta benda milik para bangsawan untuk kepentingan politik dan “perjuangan” mereka (Reid, 2012:317). Oleh karena itu, ketika kelompok ini menyerbu istana, yang mereka lakukan dengan sesegera mungkin adalah mencari di mana Sultan dan keluarga menyimpan kekayaannya dan kemudian merampas sebanyak mungkin yang mereka bisa.

Kemungkinan lain yang mendasari aksi ini ialah karena sudah bosan melihat tingkah pola para bangsawan, sebagaimana bangsawan pada umumnya

yang kerap dapat menikmati hidup mewah dan berbagai fasilitas yang sifatnya *limited* untuk semua kalangan, seperti makanan mewah, bioskop, cerutu, dan lain-lain. Para bangsawan juga sering menampilkan sikap yang kurang dapat dijadikan teladan, seperti menghambur-hamburkan kekayaan yang mereka peroleh dengan jalan yang tidak tepat, berjudi misalnya (Kuntowijoyo, 2004:62-63). Hal-hal demikian tentu merupakan kelumrahan yang diperoleh oleh para bangsawan karena harta dan status yang mereka miliki. Namun, walaupun begitu, tidak ada alasan yang terlampau pantas untuk menjadikan aksi kejam itu dapat dibenarkan.

Akhirnya perjalanan panjang kemegahan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur dipaksa untuk berhenti seketika. Para bangsawannya harus rela turun dari singgasana kemegahan yang selama ini melenakan mereka. Hal ini berlangsung singkat, bahkan barangkali tidak pernah sekalipun akan mereka sangka-sangka. Namun, pil pahit ini harus ditelan bulat-bulat, suka atau tidak suka.

Tragedi yang sering dipekikkan sebagai “revolusi sosial” ini sungguh bertolak belakang dengan realita yang sebenarnya. Pelabelan aksi brutal ini dengan istilah demikian hampir tidak menyisakan alasan yang cukup kuat. Hal ini dikarenakan revolusi yang menunjukkan perubahan dan sosial yang merujuk kepada subjek dan objeknya yaitu masyarakat, tidak jelas “rupa” nya dalam tragedy 1946 itu.

Perubahan seharusnya mengarah kepada kebaikan dan tentu dengan cara-cara yang mempertimbangkan setiap baik-buruk, serta maslahat dan mufsadatnya. Kebijakan adalah kata kunci untuk melakukan sebuah perubahan. Karena

seringkali perubahan yang bermaksud baik dan menginginkan tumbangnyaz
kezaliman, justru membuahkan kezaliman dan kerusakan yang lebih besar lagi.
Hal ini semata-mata diakibatkan oleh tindakan gegabah dan hanya mengandalkan
nafsu liar yang bergelora.

Kecerobohan inilah yang pada akhir dan bahkan sejak permulaannya
hanya menyisakan kisah pilu yang akan berusaha untuk tidak diangkat lagi ke
permukaan, semacam aib yang hanya akan menambah malu jika diumbar. Hal ini
tampak dari berbagai adegan keji yang dipertontonkan selama aksi ini di-
”pentaskan”.

Di wilayah yang teramat dekat dengan Labuhan Batu, yakni Tanjung
Balai, adalah tempat di mana aksi yang digencarkan pada tanggal 3 Maret 1946
itu berlangsung dengan sangat parah. Hampir tidak ada bangsawan Melayu yang
berhasil lolos dari serangan membabi buta kelompok pemuda yang menamai aksi
mereka dengan “revolusi sosial” itu. Para pemuda yang darahnya menggebu-gebu
dibakar doktrin bahwa para bangsawan itu memang pantas dibunuh, lekas saja
tidak kenal lagi dengan kata ampun.

Target operasi kelompok aksi ini terutama sekali para pemuda atau laki-
laki keturunan bangsawan dan atau memiliki hubungan baik dengan Belanda.
Oleh karena itu, diberitakan dalam hitungan beberapa hari saja telah ditemui 140
jenazah terbujur kaku di kota tersebut. Istana Tanjung Balai juga serta merta
kosong, karena para penghuninya hanya memiliki dua nasib saja waktu itu, jika
tidak mati, maka mengungsi, dibawa pergi, dijauhkan dari kemewahan yang lama
sudah memanjakan hidup mereka. Adapun barisan pemuda yang telah gelap mata

membunuhhi setiap bangsawan yang mereka dapati tanpa rasa malu mengabil alih istana dan dijadikan sebagai Gedung Rakyat (Reid, 2012:319).

Ironisnya, Tanjung Balai yang dibanjiri darah para bangsawan itu sehari sebelumnya telah lebih dahulu menjamu rombongan para pemuda yang menuntut “revolusi” itu. Sultan Asahan menyambut baik niat dari kelompok pemuda tersebut dan malah mengusulkan untuk diadakan penghimpunan kerjasama untuk mencapai cita-cita bersama terhadap Republik Indonesia yang baru saja berdiri (Reid, 2012:316). Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan tambahan untuk menunda aksi tersebut dilancarkan. Namun ternyata dengan darah yang masih panas-panasnya tetap membulatkan tekad untuk menggempur Istana Sultan Asaha di Tanjung Balai serta seisi kotanya. Tampaklah bahwa yang melandasi perjuangan ini, sekali lagi hanyalah nafsu liar semata. Sultan yang sudah bertekad baik dan seharusnya menunggu untuk sebuah realisasi, malah diberangus sehari setelah mereka menunjukkan *i'tikad* baik tersebut.

Sementara itu, di Labuhanbatu sendiri aksi serupa juga tidak kalah parah. Di wilayah ini, semangat perjuangan itu konon didasari oleh rasa tidak tahan terhadap sikap para pembesar istana yang suka melakukan penindasan kepada rakyat dan kaum pergerakan dengan tanpa tapi dan tanpa ampun. Keberingasan aksi kelompok pemuda itu ditunjukkan dengan penyergapan wakil pemerintah NRI, anak kandung bangsa Indonesia, Tengku Hasnan beserta tiga orang tangan kanannya pada tengah malam untuk dibawa ke tepi sungai yang curam untuk kemudian dibunuh. Tengku Hasnan dan Tengku Long dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, sementara dua orang lainnya berhasil selamat dengan

melompat lebih dahulu ke dalam sungai sebelum dibunuh. Sultan Kualuh di Labuhanbatu yang juga disergap pada saat yang sama juga hilang begitu saja setelah peristiwa tersebut, padahal beliau beserta anaknya sempat ditemukan selamat dengan banyak bekas tusukan tombak ditubuhnya. Adapun para nasib para bangsawan dan ahli keluarga sultan berakhir sama dengan apa yang terjadi di kerajaan-kerajaan lain di Sumatera Timur, ada yang dibunuh dan sebagian lainnya ditawan (Reid, 2012:319-320).

Kesultanan lain yang juga merasakan “revolusi sosial” ini ialah Kesultanan Panai. Perlakuan yang sama dirasakan oleh sultan dan keluarga serta para pembesar kerajaannya. Sultan terakhir yang bernama Tengku Hamlet merupakan penutup raja-raja di Kerajaan/Kesultanan Panai. Ia terbunuh dalam peristiwa tersebut, sementara itu tidak didapati informasi yang cukup memadai untuk nama-nama korban lain selama peristiwa ini berlangsung di Kesultanan Panai (Nirmawan d.k.k, 2019:12).

Adapun Kesultanan Kota Pinang juga tidak luput dari penyerangan tersebut. Istana Kota Pinang yang semula berdiri gagah hanya menyisakan pondasinya saja akibat ledakan yang terjadi pada Maret 1946. Walaupun tidak hancur sepenuhnya, setidaknya masih ada sisa-sisa peristiwa sejarah yang dapat disaksikan langsung oleh generasi penerus (Gambar).



Gambar 2. Istana Kota Pinang yang Hancur Akibat Revolusi Sosial
(Sumber: metosiantar)

Kasus di Sumatera Timur, terutama di wilayah Asahan, Kualuh, Bilah, Panai dan Kota Pinang memang yang paling menyisakan kisah kelam dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Padahal revolusi yang sedikit lebih beradab dan tanpa pertumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa bisa saja terwujud sebagaimana yang didapati pada beberapa wilayah lain seperti di Tanah Karo, Serdang, dan beberapa kerajaan di Simalungun (Reid, 2011:328).

Langkah terburu-buru yang dipilih oleh para kaum pergerakan menodai kemuliaan tekad mereka, jika benar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis di Indonesia. Banyak cara yang dapat ditempuh tanpa harus melawan anak kandung bangsa sendiri, saudara satu ibu pertiwi. Apalagi sebenarnya pada masa itu pemerintahan yang dijalankan oleh para sultan di kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur telah pincang jalannya, terseok-seok bahkan. Hal ini dikarenakan

para pemimpin di kerajaan-kerajaan itu telah kehilangan pengaruh dihadapan rakyatnya (Reid, 2012:309):

“Tidak saja rakyat tidak mau lagi datang ke kantor-kantor raja itu karena perubahan suasana yang drastis, tetapi pejabat-pejabat kerajaan itu sendiri juga sering tidak lagi tampak batang hidungnya di kantor.”

Setelah kemerdekaan, kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan sudah mulai berkurang. Rasa simpatik mereka berangsur menurun. Hal ini dikarenakan mereka sudah melihat bagaimana perilaku yang dipertontonkan oleh para pembesar kerajaan dan bagaimana sejatinya keberpihakan mereka terhadap rakyat, serta komitmen mereka untuk memakmurkan rakyat.

Rasa tidak simpatik masyarakat terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh para raja/sultan muncul seketika. Itu adalah hasil dari endapan dari apa yang mereka telah lama identifikasi sebagai penyakit dalam tubuh kerajaan. Sebagaimana diketahui bahwa raja dari awal , langsung maupun tidak langsung menjadi alat Belanda untuk melegitimasi kekuasaan mereka di sebuah wilayah. Meskipun memberi otoritas terhadap sultan, namun otoritas tersebut juga dapat dipastikan dalam ruang lingkup yang kecil lagi terbatas. Terlebih lagi, para raja atau sultan yang tidak pro kemakmuran rakyat sudah sangat senang dengan aliran dana yang mengalir ke kantung kas kerajaannya, yang dapat dinikmati oleh dirinya, keluarga, dan para pembesarnya.

Walaupun tidak seluruh raja/sultan melakukan praktik demikian, namun pasti ada saja di kalangan kaum kerabatnya yang bersikap kurang tepat. Hal inilah

yang turut menjadi celah dibalik aksi gegabah yang dilancarkan oleh para pemuda yang tergabung dalam barisan kaum pergerakan atau *persatuan perjuangan* itu.

Pemerintahan raja-raja di Sumatera Timur jelas dalam keadaan lemah. Maka serangan yang sangat tidak beradab yang ditujukan kepada mereka merupakan upaya yang hanya dilakukan oleh para pengecut. Ditambah lagi, hampir seluruh kerajaan tidak memiliki pasukan bersenjata atau pengawal kerajaan dalam jumlah banyak. Mereka hampir-hampir tidak memiliki perangkat yang cukup kuat untuk “melawan” rakyatnya sendiri. Karena pemerintahan mereka malah mengharapkan perlindungan dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, posisi kerajaan-kerajaan Melayu pada umumnya tidak siap dan lemah.

Aksi berlebihan kaum pergerakan itu dapat diserupakan dengan gerombolan penjahat dan penyamun yang pekerjaannya adalah menciptakan kerusuhan dan *terror* di kerajaan. Mereka akan muncul ke permukaan dan memulai aksi mereka ketika kondisi kerajaan sedang dalam keadaan yang lemah. Adapun ketika kerajaan sedang dalam kondisi yang prima dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan penumpasan, mereka memilih untuk berlindung di hutan belantara (Moertono, 1985:99). Begitulah yang dilakukan oleh kaum pergerakan, mereka dengan pengecutnya membunuh orang-orang yang tidak bersenjata bahkan banyak diantaranya yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dan ketertarikan terhadap dunia politik yang ramai mereka jadikan alat untuk merampas peradaban kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur.